

KLIPING BERITA MEDIA MASSA



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Kompas, Hal 6	Minggu, 12 Januari 2020	Opini	Tol yang Kurang Sejalan
2	Kompas, Hal. 14	Sabtu, 11 Januari 2020	Dampak Tak Instan	Pembangunan destinasi wisata perlu waktu serta melibatkan masyarakat
3	Bisnis Indonesia. Hal 17	Senin, 13 Januari 2020	Infrastruktur Pendukung Harus Kuat	Pemerintah diminta segera memantapkan infrastruktur serta sektor industri berbasis sumber daya alam guna memacu pengembangan kawasan industri di luar Pulau Jawa
4	Bisnis Indonesia. Hal 19	Senin, 13 Januari 2020	Swasta Berharap Konsesi hingga 90 Tahun	Kepastian konsesi menjadi penting karena sangat memengaruhi keputusan para pengembangan untuk ikut terlibat dalam proyek ibu kota negara yang baru
5	Bisnis Indonesia. Hal 19	Senin, 13 Januari 2020	Dua Rest Area Siap Beroperasi Mei	Dua rest area di ruas Pemalang-Batang ditargetkan dapat beroperasi pada Mei 2020
6	Bisnis Indonesia. Hal 2	Senin, 13 Januari 2020	Porsi Swasta Lebih Besar	Pemerintah menetapkan 18 waduk multiguna sebagai prioritas pembangunan hingga 2020
7	Koran Tempo, Hal 2	Senin, 13 Januari 2020	Proyek Jalan Tol Butuh Investasi Rp 400 Triliun	Pemerintah menjajaki peluang investasi dengan lembaga baru dari Amerika Serikat
8	Koran Tempo, Hal 3	Senin, 13 Januari 2020	Prioritas Pengadaan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung	Balai Besar Ciliwung-Cisadane mengalokasikan Rp 20 miliar untuk normalisasi 1,2KM Ciliwung
9	Koran Tempo, Hal 4	Senin, 13 Januari 2020	Pusat Sediakan Rp 60 Miliar untuk Lahan Sodetan Ciliwung	Presiden Joko Widodo meminta sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur bisa rampung tahun ini

Judul	Opini	Tanggal	Minggu, 12 Januari 2020
Media	Kompas, Hal 6		
Resume	Tol yang Kurang Sejalan		

Tol yang Kurang Sejalan

Penambahan enam ruas tol dalam kota bisa mengurangi kepadatan lalu lintas di Jakarta. Di sisi lain, tol baru dinilai kurang sejalan dengan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi dan berpotensi meningkatkan pencemaran udara.

ANTONIUS PURWANTO, *Litbang Kompas*

Usulan pembangunan enam ruas tol itu muncul pada 2005. Namun, usulan proyek itu tak kunjung dikerjakan dan sempat menuai polemik.

Titik terang pembangunan enam ruas tol itu mulai terlihat setelah pemerintah pusat mengambil alih proyek dari Pemprov DKI Jakarta. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Perubahan Nomor 58 Tahun 2017 yang kemudian direvisi melalui Perpres Nomor 56 Tahun 2018.

Proyek enam tol baru itu meliputi Kampung Melayu-Kemayoran (9,6 km), Semanan-Sunter (20,2 km), Kampung Melayu-Duripulo (12,7 km), Sunter-Pulo Gebang (9,4 km), Ulujami-Tanah Abang (8,7 km), dan Pasar Minggu-Casablanca (9,2 km).

Saat ini, pengerjaan proyek terbagi dalam tiga seksi sepanjang 31,1 kilometer. Jumlah itu baru separuh dari keseluruhan ruas tol yang memiliki panjang 69,8 kilometer.

Pembangunan enam ruas tol baru dipandang positif oleh hampir 60 persen responden jajak pendapat *Kompas* akhir Desember lalu. Lebih dari separuh dukungan berasal dari responden pengguna tol.

Tol baru itu dinilai akan membantu memecahkan masalah kepadatan lalu lintas barat-timur Jakarta dan menam-

bah kapasitas tol yang ada saat ini.

Selain itu, tol berkonstruksi layang tersebut akan menjadi jalur alternatif logistik barat-timur yang sudah padat. Saat ini, hanya ada dua tol di jalur tersebut, yaitu Tol Pelabuhan dan Tol Lingkar Luar (JORR).

Selain mengurangi beban tol dalam kota, enam ruas tol baru tersebut dianggap bisa mengurangi kemacetan di Ibu Kota. Hal itu disampaikan 64 persen responden.

Proyek enam ruas tol dalam kota akan menambah 1 persen panjang jalan dari total panjang jalan nasional dan provinsi (6.956 kilometer) dan 3,7 persen dari total jalan di Jakarta yang seluas 48,5 juta meter persegi.

Tidak mendukung

Akan tetapi, tidak semua responden mempunyai pandangan positif. Sekitar 36 persen responden justru menyatakan pendapat berbeda. Penambahan tol baru dinilai akan menambah beban lalu lintas dalam kota dan meningkatkan pergerakan mobil masuk ke pusat kota.

Pembangunan tol baru juga tidak akan mengurangi kemacetan secara efektif seperti dinyatakan sekitar seperempat lebih responden. Alasannya, jika jalan bertambah, akan memicu penambahan kendaraan pribadi. Simpul-simpul kemacetan baru

diperkirakan muncul seiring peningkatan kendaraan pribadi.

Jika enam ruas tol baru ini selesai dibangun, penambahan jalan tidak akan signifikan memenuhi kebutuhan lalu lintas kendaraan bermotor di Ibu Kota. Pertumbuhan jalan tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan pribadi sebanyak 5-7 persen per tahun.

Penambahan tol baru dikawatirkan akan meningkatkan polusi udara dan berdampak pada kesehatan masyarakat. Hal itu dinyatakan oleh hampir 47 persen responden.

Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) tahun 2016 memprediksi, keseluruhan tol di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sepanjang 565 kilometer menghasilkan karbon dioksida (CO₂) sekitar 16,62 juta ton per tahun.

Jika ditambah dengan adanya enam ruas tol baru ini, kontribusi karbon dioksida akan bertambah sekitar 3 juta ton per tahun.

Bukan prioritas

Kendati tol baru dalam kota bisa mengurangi kemacetan, hanya sebagian kecil responden yang menganggapnya sebagai prioritas utama. Jalan baru yang dibangun tidak akan mampu menampung jumlah dan pertumbuhan kendaraan yang beredar.

Kebijakan pembatasan kendaraan pribadi justru dinilai oleh tiga dari lima responden

sebagai prioritas utama dalam menyelesaikan persoalan kemacetan. Kebijakan pembatasan kendaraan pribadi itu meliputi sistem ganjil-genap, pajak progresif, ataupun sistem jalan berbayar (*electronic road pricing/ERP*).

Kebijakan pembatasan kendaraan pribadi bisa dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum. Menurut catatan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, sebulan setelah perluasan kebijakan ganjil-genap, September 2019, jumlah penumpang bus Transjakarta naik 12 persen.

Cara lain dengan membuat transportasi umum menjadi menarik, yakni dengan membuat angkutan umum menjadi lebih mudah diakses, nyaman, dan berkualitas. Hal itu disampaikan 32 persen responden.

Menurut studi Transjakarta, sekitar 73 persen penduduk sudah bisa mengakses angkutan JakLingko kurang dari 500 meter dari tempat tinggal mereka. Hal itu berarti angkutan umum semakin mendekati masyarakat. Kondisi bus yang nyaman dengan fasilitas pendingin ruangan juga semakin menarik minat warga untuk menggunakannya.

Mengurangi kemacetan di DKI Jakarta memang bukan perkara mudah. Pembangunan ruas tol baru bukanlah solusi utama. Saat ini yang dibutuhkan adalah kehadiran transportasi massal yang memadai dan dibarengi dengan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi.

Menurut Anda, apakah pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota nantinya akan efektif mengatasi kemacetan atau menambah kemacetan di Jakarta?



Metode Jajak Pendapat

Metode survei pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan Litbang Kompas pada 21-22 Desember 2019. Sebanyak 478 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis dari buku telepon terbaru. Responden berdomisili di Jabodetabek. Jumlah responden di setiap wilayah ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian $\pm 4,5$ persen. Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan dimungkinkan terjadi. Hasil jajak pendapat ini tidak dimaksudkan untuk mewakili pendapat seluruh masyarakat di wilayah tersebut.

Sumber: Litbang Kompas

Untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota, solusi apa yang paling menjadi prioritas saat ini?



Dengan penambahan ruas jalan tol baru tersebut, menurut Anda akan semakin baik, sama saja, atau semakin burukkan kualitas udara Jakarta?



Yakin atau tidakkah Anda pembangunan enam ruas jalan tol baru akan mengurangi beban tol dalam kota Jakarta?



INFOGRAFIK HANS

Judul	Dampak Tak Instan	Tanggal	Sabtu, 11 Januari 2020
Media	Kompas, Hal. 14		
Resume	Pembangunan destinasi wisata perlu waktu serta melibatkan masyarakat		

Dampak Tak Instan

Pembangunan destinasi wisata perlu waktu serta melibatkan masyarakat dan industri. Di Banyuwangi, pariwisata diyakini menekan kemiskinan.

JAKARTA, KOMPAS — Untuk meraih dampak optimal dari penetapan destinasi prioritas ataupun superprioritas, pemerintah lebih aktif bersinergi dengan industri dan masyarakat setempat. Sinergi dapat diwujudkan dalam bentuk pengembangan produk yang menarik bagi wisatawan.

Kendati demikian, dampak pembangunan industri pariwisata tersebut tidak instan.

Ketua Tim Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Hiramayah S Thaib, Jumat (10/1/2020), di Jakarta, mencontohkan Nusa Dua, Bali. Pembangunannya memerlukan lebih dari 10 tahun, yang hasilnya baru terlihat dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah menetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas pada 2016. Namun, pada 2019, dari 10 destinasi wisata "Bali

baru" itu, pemerintah menetapkan 5 destinasi superprioritas. Kelima destinasi yang disebut Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Superprioritas itu adalah Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado Bitung-Likupang.

Menurut Hiramayah, penetapan tujuan wisata prioritas itu sudah menunjukkan hasil positif, di antaranya kenaikan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara. Peningkatan jumlah wisatawan ini mendorong pendapatan asli daerah.

"Sepuluh destinasi prioritas tetap berjalan meskipun pemerintah menetapkan lima destinasi superprioritas. Salah satu alasan penetapan lima destinasi superprioritas adalah dukungan infrastruktur yang lebih masif," katanya.

Hiramayah menambahkan, secara prinsip, penetapan destinasi prioritas dan superprioritas adalah membangun titik

kumpul tujuan pariwisata baru yang berdampak terhadap provinsi serta kabupaten/kota di sekitarnya.

Berdasarkan data BPS, pada Januari-November 2019 ada 14,92 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Jumlah itu meningkat 3,55 persen ketimbang periode yang sama pada 2018.

Disiapkan

Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kosmian Pudjadi menceritakan, Pemerintah Thailand dan Taiwan bersinergi dengan pelaku industri skala besar, kecil, dan menengah. Sinergi berupa riset makanan dan barang yang disukai wisatawan, yang hasilnya menjadi dasar dalam menciptakan produk.

Dia mengibaratkan upaya membangun destinasi pariwisata seperti mal. Selain menentukan lokasi dan sarana infra-

struktur, produknya juga harus disiapkan.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyebutkan, kendati tak masuk dalam destinasi wisata prioritas, Banyuwangi tetap menempatkan pariwisata sebagai sektor industri andalan. "Kami menyiapkan aneka destinasi baru disertai pembangunan infrastruktur pendukungnya. Kemudian promosinya harus gencar," katanya.

Menurut Azwar Anas, tingkat kemiskinan di Banyuwangi dalam enam tahun terakhir turun dari 20,4 persen jadi 7,52 persen. Pendapatan per kapita per tahun naik dari Rp 20 juta jadi Rp 48 juta. Pencapaian itu diyakini merupakan hasil pengembangan pariwisata.

Tim ahli Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Muhammad Baiquni, berpendapat, pemerintah daerah berperan dalam pembangunan industri pariwisata.

(MED)

Judul	Infrastruktur Pendukung Harus Kuat	Tanggal	Senin, 13 Januari 2020
Media	Bisnis Indonesia. Hal 17		
Resume	Pemerintah diminta segera memantapkan infrastruktur serta sektor industri berbasis sumber daya alam guna memacu pengembangan kawasan industri di luar Pulau Jawa		

► KAWASAN INDUSTRI LUAR PULAU JAWA

Infrastruktur Pendukung Harus Kuat

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah diminta segera memantapkan infrastruktur serta sektor industri berbasis sumber daya alam guna memacu pengembangan kawasan industri (KI) di luar Pulau Jawa.

Oktaviano D.B. Hana & Andi M. Arief
redaksi@bisnis.com

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar mengatakan hal itu menjadi satu dari sejumlah faktor yang perlu direalisasikan pemerintah agar mampu menarik investor masuk ke sejumlah daerah di luar Pulau Jawa. Menurutnya, pengembangan basis industri di luar Pulau Jawa itu sudah masuk dalam program prioritas pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah bagi produk manufaktur nasional.

Sektor berbasis SDA yang diarahkan pengembangannya di luar Pulau Jawa itu adalah agri dan kehutanan serta industri turunannya; sektor mineral; industri migas; serta industri kelautan dan maritim.

"Masing-masing dari empat sektor tadi harus dipersiapkan agar investor berminat atau tertarik untuk masuk," ujarnya kepada *Bisnis*, Minggu (12/1).

Sanny, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi, menilai faktor lain yang perlu dipersiapkan pemerintah untuk mewujudkan target 2020 itu adalah pengembangan infrastruktur dasar dan sarana serta prasarana industri.

Menurutnya, 5 tahun pertama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo sudah dilalui dengan fokus pengembangan infrastruktur. Namun, dia menilai penguatan jalinan infrastruktur itu perlu terus dilanjutkan untuk menekan biaya logistik.

"Masih ada kawasan industri yang berjarak dengan fasilitas logistik sehingga biayanya tinggi. Alhasil, menjadi ekonomi yang tidak punya daya saing tinggi," ujarnya.

Faktor lain, sambung Sanny, adalah perlunya menarik sejumlah investor strategis yang memiliki pendanaan dan teknologi terkini di bidang industri terkait. Dia mencontohkan kawasan industri Morowali yang dikembangkan oleh investor yang memiliki kemampuan pendanaan dan pengalaman di bidang pengolahan nikel.

Menurutnya, kawasan industri itu menghadirkan pusat manufaktur terintegrasi dari hulu ke hilir dengan dukungan infrastruktur dan jaringan logistik yang kuat. "Kita perlu mencari *anchor industry* yang membawa pendanaan, teknologi. Ini jadi satu hal yang krusial sekali," ujarnya.

Sanny berharap *omnibus law* bisa terealisasi agar arus investasi terealisasi pada tahun ini. Dengan dukungan regulasi dan rencana pemerintah itu, pihaknya optimistis sejumlah target

PRIORITAS PEMBANGUNAN

Pada 2020 - 2024, ada 27 kawasan industri prioritas yang direncanakan, yaitu 14 di Pulau Sumatera, enam di Kalimantan, satu di Madura, satu di Jawa, tiga di Sulawesi dan Kepulauan Maluku, satu di Papua, serta satu di Nusa Tenggara Barat.



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Jumlah Kawasan Industri Operasional 2019

Wilayah	2014	2019
Jawa	50 kawasan	58 kawasan
Sumatra	19 kawasan	33 kawasan
Kalimantan	3 kawasan	8 kawasan
Sulawesi	2 kawasan	4 kawasan
Total	74 kawasan	103 kawasan

Jumlah Kawasan Industri Tahap Konstruksi 2019*

Wilayah	Jumlah	Luas (hektare)
Jawa	15 kawasan	4.067,4
Kalimantan	11 kawasan	4.959,33
Maluku-Papua	2 kawasan	600
Sulawesi	1 kawasan	849
Sumatra	2 kawasan	4.083

pengembangan industri, termasuk di luar Pulau Jawa bisa terealisasi.

Dengan perkembangan industri, dia berharap pertumbuhan ekonomi nasional bisa terkerek setidaknya hingga kisaran 1%. "Harusnya sejumlah target [Kemenperin] ini cukup realistis. Apalagi, berbagai kebijakan yang mendasari sudah tepat. Kami cukup optimistis."

TARIF LISTRIK

Sementara itu, Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA) menyatakan pembangunan kawasan industri logam di luar Jawa akan membuat serapan baja meningkat. Namun, asosiasi menyarankan agar pemangku kepentingan mencari daerah dengan ongkos logistik dan listrik yang murah.

Ketua Umum IISIA Silmy Karim menilai pembangunan kawasan industri logam di luar pulau Jawa merupakan langkah yang baik. Dia mengusulkan agar tarif listrik di kawasan industri logam yang baru menetapkan tarif listrik di bawah US\$6 sen/kWh dan tarif gas di bawah US\$4—US\$5/MMBTU.

"*Competitiveness* suatu industri itu harus *by design*, disiapkan, tidak sekadar *ujug-ujug*. Intinya, listriknya mesti ada dan murah," katanya kepada *Bisnis*, Jumat (10/1).

Menurutnya, saat ini pabrikan logam secara umum merogoh US\$7—US\$11 sen/kWh untuk mendapatkan listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara. Namun, ada pabrikan yang membayar lebih rendah dari US\$5,5 sen/kWh seperti PT Inalum.

Cabangan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) menilai pengembangan kawasan industri di luar Pulau Jawa perlu difokuskan untuk penguatan sektor hulu untuk menyokong pertumbuhan dan rantai pasok industri hilir.

Ketua Umum Gapmmi Adhi S Lukman mengapresiasi rencana pemerintah untuk melanjutkan perluasan industri di luar Pulau Jawa dengan berfokus pada sumber daya alam. Menurutnya, selama ini pertumbuhan industri hilir yang signifikan tidak dibarengi peningkatan industri hulu yang kurang berkembang.

Pasalnya, pengembangan industri hulu membutuhkan investasi yang lebih mahal dan lahan yang lebih luas.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa pemerintah gencar menarik investasi, khususnya bagi sektor industri yang berorientasi ekspor, menghasilkan produk substitusi impor, berbasis teknologi tinggi, dan sektor padat karya.

Kemenperin memperkirakan nilai investasi yang masuk ke sektor manufaktur nasional pada 2020 mampu mencapai Rp307 triliun—Rp351 triliun. Realisasi itu meningkat signifikan dari proyeksi investasi industri yang diproyeksikan mencapai Rp188,8 triliun—Rp204,6 triliun pada akhir 2019.

Guna memfasilitasi investasi yang masuk di Tanah Air, pemerintah tetap memprioritaskan penyebaran industri ke luar Pulau Jawa, salah satunya melalui pengembangan kawasan industri prioritas. Pada 2020—2024, ada 27 kawasan industri prioritas yang direncanakan. ■

Judul	Swasta Berharap Konsesi hingga 90 Tahun	Tanggal	Senin, 13 Januari 2020
Media	Bisnis Indonesia. Hal 19		
Resume	Kepastian konsesi menjadi penting karena sangat memengaruhi keputusan para pengembang untuk ikut terlibat dalam proyek ibu kota negara yang baru		

► PROYEK IBU KOTA BARU

Swasta Berharap Konsesi Hingga 90 Tahun

Bisnis, JAKARTA — Pelaku bisnis properti berharap konsesi proyek pembangunan ibu kota negara yang baru bisa benar-benar menarik bagi swasta, misalnya bisa diperpanjang langsung hingga 90 tahun.

Wakil Ketua Umum Koordinator bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan DPP REI Hari Ganie mengatakan kepastian mengenai masa konsesi dianggap penting, karena hal tersebut akan sangat mempengaruhi keputusan para pengembang untuk ikut terlibat dalam proyek ibu kota negara (IKN) yang baru.

"Agar menarik, kami memberi masukan misalnya masa konsesinya bisa diperpanjang menjadi langsung sekitar 90 tahun. Kalau bisa diberikan langsung maka kami rasa pihak swasta akan lebih senang," ujar Hari akhir pekan lalu.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid sebelumnya mengatakan pemerintah akan mengajak pengembang untuk bekerja sama dalam proyek pembangunan perumahan di ibu kota negara.

Melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), katanya, swasta akan diberikan hak konsesi untuk jangka waktu tertentu. Apabila masa konsesinya telah berakhir, maka pengelolanya akan dikembalikan kepada pemerintah.

Sementara itu, kajian PWC Indonesia yang ditulis oleh Julian Smith Capital Projects & Infrastructure Advisor PWC Indonesia dan Widita Sardjono Technology Consulting Leader PWC Indonesia yang diterima *Bisnis*, Jumat (10/1) mengungkapkan bahwa ada beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan pemerintah sebelum bekerja sama dengan swasta dalam proyek IKN.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain adalah pengadaan yang kompetitif, transparan, dan dipaketkan secara optimal. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menyelaraskan pelelangan kontrak dengan kemauan pasar sehingga

menarik pemasok internasional secara luas dengan mitra dari Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga dapat menjalankan opsi pembiayaan berskala internasional dengan mata uang yang stabil. PWC Indonesia menilai proyek IKN terlalu besar untuk dibiayai dengan rupiah.

Terakhir adalah pencegahan spekulasi dengan mekanisme *clawback* kontraktual yang inovatif guna mencegah investor meraih keuntungan dari kenaikan nilai properti dengan menggunakan biaya publik.

Dalam menjalankan skema KPBU, PWC Indonesia juga menilai pemerintah dapat belajar dari negara-negara lain seperti Inggris dan Belanda yang telah berhasil menggunakan skema KPBU untuk pembangunan fasilitas pemerintahan seperti kantor pemerintahan, pos polisi, dan gedung pengadilan.

ASING BERMINAT

Proyek pembangunan ibu kota negara yang baru juga diminati asing. Salah satunya Perusahaan multinasional asal Jepang, Softbank.

"Konsep kota pintar dengan teknologi terbaru, kota hijau, dan juga pengembangan *artificial intelligence* itulah yang kami tertarik untuk dukung," kata Presiden Softbank Masayoshi Son setelah bertemu Presiden Joko Widodo pekan lalu.

Softbank akan menyusun sejumlah potensi kerja sama dalam pembangunan ibu kota yang berada di antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara itu.

Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkap nilai investasi yang ditawarkan mencapai miliaran dolar AS. Pemerintah Indonesia, jelas Luhut, akan menghitung rasionalitas dari potensi investasi itu.

Softbank, katanya, dapat mendukung investasi untuk pembangunan sarana pendukung ibu kota baru. "Tapi memang khusus pembangunan gedung pemerintah dibiayai oleh *state budget* (APBN). Semua pendukungnya itu bisa nanti oleh Softbank," katanya. *(Piri Sartika Dewi)*

Judul	Dua Rest Area Siap Beroperasi Mei	Tanggal	Senin, 13 Januari 2020
Media	Bisnis Indonesia. Hal 19		
Resume	Dua rest area di ruas Pemalang-Batang ditargetkan dapat beroperasi pada Mei 2020		

► TOL PEMALANG BATANG

Dua Rest Area Siap Beroperasi Mei

Bisnis, JAKARTA — PT Pemalang Batang Toll Road (PBTR) menargetkan pengoperasian secara terbatas atau fungsional pada dua tempat istirahat dan pelayanan (TIP) yang tengah dibangun pada Mei 2020. Sejak beroperasi penuh pada 2018, jalan tol Pemalang—Batang belum memiliki TIP atau *rest area*.

Direktur Utama PBTR Supriyono mengatakan dua TIP yang sedang dibangun berlokasi di KM 340 arah Semarang dan KM 319 arah Jakarta. Dia menambahkan, konstruksi TIP di KM 340 sudah dimulai sedangkan di KM 319 masih dalam proses pembebasan lahan.

“Target operasional Desember 2020, tetapi kami usahakan bisa fungsional saat Lebaran nanti,” ujar Supriyono kepada *Bisnis*,

Minggu (12/1).

Untuk membangun dua TIP tersebut PBTR menggandeng dua investor. Walhasil, operator jalan tol sepanjang 39,2 kilometer itu tidak merogoh kocek untuk investasi pembangunan TIP. Menurut Supriyono, investasi pembangunan TIP berkisar Rp150 miliar hingga Rp200 miliar.

Berdasarkan catatan *Bisnis*, dua TIP yang dibangun di jalan tol Pemalang—Batang merupakan tipe A atau TIP dengan fasilitas paling lengkap. Badan usaha harus menyediakan lahan minimal 4 hektare untuk membangun TIP tipe A dan menyediakan sejumlah fasilitas seperti stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), tempat parkir, toilet, tempat ibadah, dan ruang terbuka hijau.

Satu TIP yang akan diba-

ngun di jalan tol Pemalang—Batang bakal mengadopsi konsep transit antar moda. Supriyono menuturkan, investor yang akan membangun TIP di KM 340 B adalah perusahaan otobus dengan luas lahan pengembangan 9 hektare.

Konsep transit antar moda merupakan 1 dari 4 fungsi baru yang akan ditambahkan di TIP. Penambahan fungsi tersebut bakal tertuang di dalam revisi Peraturan Menteri PUPR No.10/PRT/M/2018. Selain transit antar moda, fungsi lain yang akan ditambahkan yaitu destinasi wisata, hub logistik, dan kawasan industri.

TOL BOCIMI

Sementara itu, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan

Umum & Perumahan Rakyat memperkirakan pembangunan jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) seksi 2 rampung pada 2021. Penyelesaian seksi 2 bakal memperpanjang operasional jalan tol itu jadi 27 kilometer.

Berdasarkan publikasi BPJT pekan lalu, progres konstruksi jalan tol Bocimi seksi 2 mencapai 36,2% per awal Januari 2020. Saat ini, jalan tol Bocimi baru beroperasi di seksi 1 sepanjang 15,34 kilometer.

Jalan tol Bocimi total memiliki panjang 54 km, terdiri dari seksi 1 Ciawi-Cigombong (15,35 km), seksi 2 Cigombong-Cibadak (11,9 km), seksi 3 Cibadak-Sukabumi Barat (13,7 km), dan seksi 4 Sukabumi Barat-Sukabumi Timur (13,05 km). (*Rivki Maulana*)

Judul	Porsi Swasta Lebih Besar	Tanggal	Senin, 13 Januari 2020
Media	Bisnis Indonesia. Hal 2		
Resume	Pemerintah menetapkan 18 waduk multiguna sebagai prioritas pembangunan hingga 2020		

▶ ANGGARAN PEMBANGUNAN WADUK

Porsi Swasta Lebih Besar

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah menetapkan pembangunan 18 waduk multiguna sebagai prioritas pembangunan hingga 2024.

Kalangan swasta diproyeksi memberikan kontribusi pendanaan sebesar Rp96 triliun.

Rivki Maulana
rivki.maulana@bisnis.com

Berdasarkan dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, pembangunan 18 waduk multiguna menjadi salah satu dari 41 proyek prioritas yang dinilai memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan.

Dokumen yang dikutip *Bisnis*, Jumat (10/1) menunjukkan, pembangunan 18 waduk multiguna merupakan bagian dari upaya memperkuat infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,

Sebagai catatan, daftar proyek prioritas strategis dan indikasi pendanaannya akan dimutakhirkan hingga penetapan Peraturan Presiden tentang RPJMN 2020—2024. Secara khusus, proyek pembangunan 18

yang mencapai 4.000 liter per detik.

Di samping itu, 18 waduk multiguna juga bakal menjadi andalan 51 daerah irigasi premium dan meningkatkan kinerja irigasi di atas 70% pada sembilan daerah irigasi. Pembangunan 18 waduk juga akan mendukung target pembangunan jaringan irigasi baru sebesar 500.000 hektare dan rehabilitasi jaringan daerah irigasi seluas 2 juta hektare.

Untuk diketahui, pasokan air irigasi dari bendungan hingga 2019 baru mencapai 12,5% dari keseluruhan luas daerah irigasi. Hal itu antara lain disebabkan kapasitas tampungan air masih rendah akibat terbatasnya jumlah bendungan, embung, dan penampung air lainnya. Kapasitas tampungan air baru mencapai 13,72 miliar meter kubik dari target 14,7 miliar meter kubik pada 2019.

dibangun dan sisanya akan rampung hingga 2023.

Menurut Basuki, pembangunan bendungan baru akan dimulai pada 2021 dengan jumlah bendungan baru yang dibangun per tahun diperkirakan sebanyak lima bendungan.

Hingga kini, Indonesia memiliki 231 bendungan besar yang mampu mengairi sawah irigasi sebanyak 11% dari total tujuh juta hektar lahan irigasi yang di Indonesia. Rasio tersebut dinilai masih rendah sehingga pembangunan bendungan baru perlu terus dilakukan.

Secara khusus, pada tahun ini Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebanyak Rp18,52 triliun untuk pembangunan bendungan dan embung. Kepala Pusat Bendungan Kementerian PUPR Ni Made Sumiarsih mengatakan jumlah tersebut merupakan yang pos yang paling besar pada daftar isian pelaksanaan anggaran Ditjen Sumber Daya Air.

"Selain bendungan baru, kami juga akan merehabilitasi 2 bendungan yakni Bendungan Wonogiri dan Bendungan Benanga," tuturnya.

Terkait banjir yang me-

proyek pembangunan 18 waduk multiguna diperkirakan menelan investasi sebesar Rp142,7 triliun.

Sebanyak Rp96 triliun atau 67,27% diharapkan berasal dari kalangan swasta. Sementara itu, porsi APBN diproyeksi mencapai Rp18,5 triliun sedangkan porsi kerja sama lewat skema KPBU diperkirakan mencapai Rp28,2 triliun.

Pembangunan 18 waduk multiguna diperkirakan bisa menambah pasokan air baku sebanyak 23,5 meter kubik per detik atau 23.500 liter per detik, setara 5 kali lipat kapasitas sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan

ter kubik pada 2019.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan bendungan akan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur.

Dia menyebut, hingga 2023 pihaknya bakal melanjutkan 36 proyek bendungan yang masuk dalam program 65 bendungan.

Sejak 2015, Kementerian PUPR mencanangkan program 65 bendungan yang terdiri dari 49 bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan. Hingga akhir 2019, sebanyak 29 bendungan telah selesai

Terkait banjir yang melanda Jabodetabek, Basukii memastikan tanggul jebol yang menyebabkan banjir di 44 titik di kawasan Jabodetabek sudah rampung diperbaiki pada Jumat (10/1).

Perbaikan tanggul jebol merupakan penanganan jangka pendek untuk mengantisipasi prediksi cuaca ekstrim yang akan melanda Jabodetabek oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

"Saya minta tanggal 10 [Januari 2020] ini selesai semua untuk penanganan tanggul yang jebol. Dari hasil survei kan ada 44 titik banjir karena tanggul jebol dan 62 titik dari limpasan air. Nah ini yang jebol kita tutup semua," ujarnya, Jumat (10/1).

Basuki pun memastikan bahwa penanganan tanggul jebol tidak hanya dilakukan oleh Kementerian PUPR tetapi juga melibatkan Pemerintah Daerah. (Aprianus Doni T)

Proyek Waduk 2020-2024

Pemerintah terus menggenjot pembangunan sejumlah waduk yang dipakai untuk sektor pertanian dan energi. Proyek waduk itu tidak hanya digarap menggunakan anggaran negara, tapi juga bersumber dari kalangan swasta.

Manfaat Proyek

Tersedianya pasokan air baku dari waduk **23,5 m³/detik** dan pasokan listrik **2.438 megawatt**.

Tersedianya pasokan air di **51** daerah irigasi premium sebesar **20%** guna mendukung ketahanan pangan.

Peningkatan efisiensi dan kinerja irigasi di atas **70%** yang didukung oleh pemanfaatan teknologi di 9 daerah irigasi (DI).

Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)

Total 142,7

APBN : 18,5

KPBU : 28,2

Swasta : 96



Pelaksana

Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta.

Sumber: RPJMN 2020-2024 Bappenas
Bisnis/Petrisia Cahya Pratiwi

Judul	Proyek Jalan Tol Butuh Investasi Rp 400 Triliun	Tanggal	Senin, 13 Januari 2020
Media	Koran Tempo, Hal 2		
Resume	Pemerintah menjajaki peluang investasi dengan lembaga baru dari Amerika Serikat		

EKONOMI DAN BISNIS

Proyek Jalan Tol Butuh Investasi Rp 400 Triliun

Pemerintah menjajaki peluang investasi dengan lembaga baru dari Amerika Serikat.

EDISI, 13 JANUARI 2020



Pengendara melintasi ruas tol Boyolali-Solo di Mojosoongo, Boyolali, Jawa Tengah, Desember 2019. ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho

JAKARTA - Pemerintah masih mencari sokongan pembiayaan untuk rencana pembangunan jalan tol baru sepanjang 2.500 kilometer hingga 2024. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Danang Parikesit, mengatakan kebutuhan investasi sektor jalan bebas hambatan mencapai lebih dari Rp 400 triliun. "Ruangnya terbuka luas, makanya kami sangat welcome pada pemodal dan lembaga pembiayaan yang tertarik bermitra," ucap dia kepada Tempo, kemarin.

BERITA TERKAIT

Bandara Karimunjawa Bakal Menjadi Penyangga Borobudur

Proyek Jalan Tol Butuh Investasi Rp 400 Triliun

Manajemen Lama Jiwabaya Abaikan Rekomendasi BPK

Dari target tersebut, terdapat asumsi kebutuhan Rp 110-150 miliar untuk konstruksi per kilometer. Menurut Danang, penawaran proyek cenderung disesuaikan dengan karakter investor. Sebagian besar pemodal hanya mengasup modal dan berfokus pada pengembalian investasi. Namun ada pula yang bersikap aktif dalam proses konstruksi, bahkan bergabung sebagai operator. "Para financial investor pun tertarik pada akuisisi tol yang beroperasi."

Peluang investasi jumbo untuk sektor jalan tol sebelumnya diungkapkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan se usai bertemu United States International Development Finance Corporation (DFC), akhir pekan lalu. Meski masih dijajaki, lembaga pendanaan asal Amerika Serikat yang kerap bermitra dengan negara-negara berkembang itu berpotensi mengucurkan US\$ 60 miliar atau berkisar Rp 820 triliun untuk proyek milik pemerintah Indonesia.

Tak hanya jalan tol, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wijoatmodjo mengatakan pembiayaan tersebut bakal mengalir ke sektor perhotelan, dan pengembangan energi terbarukan. "Masih dibicarakan," ujar dia.

Chief Executive Officer DFC Amerika Serikat, Adam Boehler, mengatakan peluang investasi US\$ 60 miliar masih bisa meningkat hingga 4-5 kali lipat mengingat DFC baru berdiri selama dua pekan dan masih bisa menjangkau pembiayaan lebih besar.

Staf Khusus Menteri Koordinator Kemaritiman, Atmadji Sumarkidjo, membenarkan bahwa proyek tol adalah yang paling dilirik DFC. "Mereka masih akan mengirimkan tim teknis ke Indonesia. Sementara itu, Kementerian BUMN menyiapkan data dari perusahaan soal proyek yang bisa ditawarkan, misalnya pada jalan tol Jawa dan Sumatera," kata dia kepada Tempo.

Hingga akhir 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merampungkan pembangunan 1.500 kilometer jalan bebas hambatan baru yang dikerjakan sejak 2014. Jumlah jalan tol bertambah 780 kilometer selama periode pertama pemerintahan Jokowi.

Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Endra Saleh Atmawidjaja, mengatakan jalan tol yang memiliki fondasi unik membutuhkan investasi jumbo lantaran harus memakai teknologi khusus. Contohnya adalah pengembangan ruas Padang-Pekanbaru dengan panjang total 254,8 kilometer yang akan memiliki struktur terowongan, serta pembangunan jalan tol Semarang-Demak sepanjang 26,8 kilometer yang akan terhubung dengan tanggul laut. "Kami terus cari donor dana untuk proyek yang tak sekadar jalan, tapi memiliki fungsi primer lain," kata Endra, kemarin. "Pendanaan asing bersifat bilateral, bisa datang dari negara mana pun dan pada paket kerja yang berbeda."

Direktur Utama Lembaga Pembiayaan Infrastruktur Non-Anggaran Pemerintah (PINA), Ekoputro Adijayanto, mengatakan lembaganya telah memfasilitasi pemenuhan pendanaan (financial close) enam proyek jalan tol nasional hingga saat ini. Meski masih sekadar penajakan, dia mengatakan, PINA juga diundang bertemu DFC Amerika pada Jumat lalu. "Pertemuannya di rumah Duta Besar Amerika. Intinya, kami sambut baik investasi yang datang lewat DFC ini," kata Eko. **MUHAMMAD HENDARTYO | EKO WAHYUDI | YOHANES PASKALIS PAE DAE**

Modal Jumbo

Jalan tol menjadi salah satu proyek potensial yang kerap ditawarkan pemerintah kepada calon investor asing. Dukungan modal besar dibutuhkan untuk memuluskan rencana pembangunan hingga 2024. Berikut ini rencana dan realisasi investasi jalan tol.

Target Beroperasi Jalan Tol

Tahun	Jalan Tol (kilometer)
2019	2.186
2024*	5.200

*Meliputi Trans Sumatera, jalan tol dalam perencanaan, potensi prakarsa swasta

Realisasi Pengerjaan Jalan Tol (kilometer)

- Jalan tol existing pada 2014: 780
- Jalan tol baru yang dibangun pada akhir 2014-2019:

Tahun	Panjang Akumulatif
2015	132,2
2016	176,2
2017	332,8
2018	783,8
Juni 2019	985
Akhir 2019	1.500

Investasi Jalan Tol (periode 2014-2019):

- Nilai total kontrak investasi:
Rp 500 triliun
- Jumlah transaksi harian kendaraan:
99 juta unit
- Nilai transaksi tahunan kendaraan:
Rp 12 triliun
- Jumlah badan usaha jalan tol:
33 entitas



SUMBER: BADAN PENGATUR JALAN TOL
YOHANES PASKALIS FAE, WALE

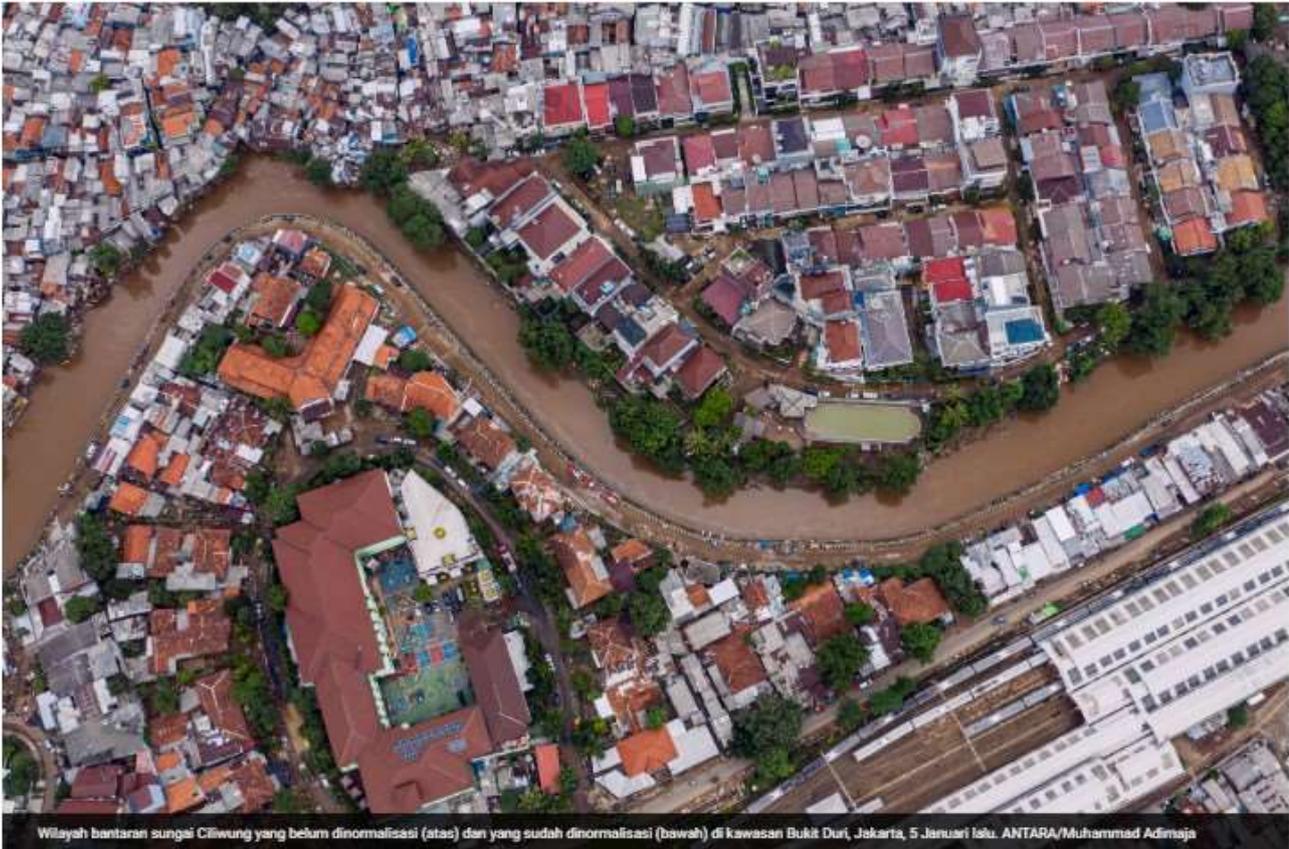
Judul	Prioritas Pengadaan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung	Tanggal	Senin, 13 Januari 2020
Media	Koran Tempo, Hal 3		
Resume	Balai Besar Ciliwung-Cisadane menganggarkan Rp 20 miliar untuk normalisasi 1,2KM Ciliwung		

METRO

Prioritas Pengadaan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung

Balai Besar Ciliwung-Cisadane menganggarkan Rp 20 miliar untuk normalisasi 1,2 kilometer Ciliwung.

EDISI 13 JANUARI 2020



Wilayah bantaran sungai Ciliwung yang belum dinormalisasi (atas) dan yang sudah dinormalisasi (bawah) di kawasan Bukit Duri, Jakarta, 5 Januari lalu. ANTARA/Muhammad Adimaja

JAKARTA - Pemerintah DKI Jakarta memprioritaskan anggaran pengadaan lahan pada tahun ini untuk program normalisasi Ciliwung. Tujuannya, untuk mengurangi dampak banjir akibat limpasan sungai terbesar yang melintasi Ibu Kota tersebut.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juaini Yusuf, mengatakan segera membebaskan 118 bidang lahan di tepi Ciliwung yang tersebar di Tanjung Barat dan Pejaten Timur di Jakarta Selatan serta Batu Ampar dan Cililitan di Jakarta Timur. "Kami geber di sana dulu," ujarnya kepada Tempo, kemarin.

Pada Rabu pekan lalu, Presiden Joko Widodo mengadakan rapat bersama kepala daerah yang wilayahnya diterjang banjir, yaitu Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Hadir juga Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Bogor Ade Yasin, dan Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya. Presiden meminta pemerintah DKI melanjutkan program antisipasi banjir, termasuk normalisasi sungai.

Jokowi, Gubernur DKI periode 2012-2014, mengatakan sungai yang perlu dinormalisasi bukan hanya Ciliwung. Masih ada sungai lain yang perlu diperlebar, seperti Kali Pesanggrahan, Cipinang, Buaran, hingga Mookervart. "Sehingga aliran air yang ada di Jakarta kembali normal," ujarnya di Istana Merdeka.

Juaini mengatakan nilai 118 bidang lahan yang akan dibebaskan itu mencapai Rp 160 miliar. Tanah tersebut telah rampung diinventarisasi sejak tahun lalu, tapi DKI belum sempat membelinya. Dia menargetkan pembebasan seluruh bidang tanah itu berlangsung pada Maret atau April mendatang. Mereka akan memastikan kembali dokumen kepemilikan warga setempat hingga kewajiban lainnya, seperti pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Menurut Juaini, dari anggaran pengadaan tanah untuk naturalisasi sungai dan waduk sebesar Rp 899 miliar pada tahun ini, Dinas akan memprioritaskannya bagi pembebasan lahan normalisasi Ciliwung. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta pemerintah DKI juga telah sepakat mengutamakan proyek itu. "Ini prioritas pengendalian banjir," ujar dia. Juaini mengatakan pembebasan lahan untuk kali lainnya, seperti Pesanggrahan, akan dilakukan setelah normalisasi Ciliwung rampung.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Bambang Hidayah, telah menganggarkan pembuatan tanggul tepi Ciliwung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 sebesar Rp 20 miliar. Dana itu ditujukan untuk menurap bibir Ciliwung sepanjang 1,2 kilometer yang lahannya dibebaskan DKI pada 2018 dan 2019.

Pengerjaan itu, dia melanjutkan, sebagian besar akan berlangsung di Pejaten Timur. Balai Besar akan melakukan lelang proyek pada bulan ini.

Proyek normalisasi Ciliwung tersendat karena terhambat pembebasan lahan. Balai Besar baru bisa membuat tanggul di tepi Ciliwung sepanjang 16,19 kilometer dari target sekitar 33,69 kilometer. Menurut Bambang, jika normalisasi di Pejaten Timur rampung, banjir di wilayah itu bakal berkurang.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono menyatakan perdebatan antara normalisasi sungai versi pemerintah pusat dan naturalisasi sungai ala DKI, yang mencuat pekan lalu, sudah tamat. Menurut dia, tidak ada perbedaan mendasar di antara dua program itu. "Semuanya butuh pelebaran sungai. Itu intinya," kata Basoeki.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menerbitkan payung hukum untuk pembebasan lahan Ciliwung. "Kami siapkan dasar hukum supaya kuat," ujarnya.

IMAM HAMD I | EGI ADYATAMA | GANGSAR PARIKESIT

Keroyokan Halau Banjir

PEMERINTAH pusat dan pemerintah DKI Jakarta menyiapkan pelbagai program antisipasi banjir dari hulu hingga hilir. Tujuannya, agar banjir besar seperti pada awal 2020 tidak terulang. Berikut ini sejumlah kebijakan tersebut.

1. Waduk Ciawi dan Sukamahi

Pembangunan dua waduk di Megamendung, Bogor, itu dimulai pada 2016. Progres Bendungan Ciawi 45 persen dan Sukamahi 35 persen. Proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu bakal mengurangi debit air Ciliwung yang mengalir ke Jakarta hingga 30 persen.

KENDALA: pembebasan lahan. Hingga pekan lalu, pembebasan lahan masih menyisakan 9,2 persen. Proyek juga kerap terbentur cuaca buruk.

2. Normalisasi Sungai

Meski menjadi prioritas, normalisasi sungai tidak hanya untuk Ciliwung. Presiden Joko Widodo menyebutkan Kali Pesanggrahan, Cipinang, Buaran, hingga Moorkervart juga harus dibenahi.

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane baru membuat tanggul di tepi Ciliwung sepanjang 16,19 kilometer dari target 33,69 kilometer.

KENDALA: lambatnya pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah DKI.

3. Sodetan Ciliwung

Sodetan bertujuan mengurangi debit air yang mengalir ke pintu air Manggarai dengan membelokkan sebagian aliran air Ciliwung ke Kanal Banjir Timur. Proyek itu dimulai pada akhir 2013 dan ditargetkan rampung pada 2015. Namun, hingga kini, proyek itu baru terealisasi 48 persen.

KENDALA: *class action* oleh warga Bidara Cina, Jakarta Timur, yang terkena imbas proyek. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan itu pada 29 Agustus 2017 dan Pengadilan Tinggi pada 27 Mei 2019. Pemerintah DKI dan Balai Besar kemudian menarik kasasi pada Agustus dan September 2019.

Judul	Pusat Sediakan Rp 60 Miliar untuk Lahan Sodetan Ciliwung	Tanggal	Senin, 13 Januari 2020
Media	Koran Tempo, Hal 4		
Resume	Presiden Joko Widodo meminta sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur bisa rampung tahun ini		

METRO

Pusat Sediakan Rp 60 Miliar untuk Lahan Sodetan Ciliwung

Presiden Joko Widodo meminta sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur bisa rampung tahun ini.

EDISI, 13 JANUARI 2020



Warga RW 05 Bidara Cina membongkar sendiri rumahnya karena dilalui proyek sodetan Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT), Jakarta, 2015. TEMPO/Subekti

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan Rp 60 miliar untuk pembebasan lahan sodetan Sungai Ciliwung. Dana itu masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Bambang Hidayah, mengatakan pembebasan lahan diperlukan untuk pembangunan inlet atau pintu masuk air sodetan Ciliwung di Bidara Cina, Jakarta Timur. "Untuk melanjutkan (pembangunan) inlet, lahannya harus bebas dulu," ujarnya kepada Tempo, kemarin.

Pada Rabu pekan lalu, Presiden Joko Widodo mengadakan rapat bersama kepala daerah yang wilayahnya diterjang banjir, yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Hadir juga Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Bogor Ade Yasin, dan Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya.

Dalam rapat itu, Presiden meminta pemerintah DKI melanjutkan program antisipasi banjir seperti normalisasi sungai. Jokowi juga menginstruksikan pembangunan sodetan Ciliwung dilanjutkan. "Saya minta yang sodetan Ciliwung menuju ke Kanal Banjir Timur itu juga tahun ini bisa dirampungkan," ujar Presiden di Istana Merdeka.

Pembangunan sodetan Ciliwung bertujuan mengurangi debit air yang mengalir ke pintu air Manggarai dengan membelokkan aliran Ciliwung ke Kanal Banjir Timur. Proyek itu dimulai pada akhir 2013 dan ditargetkan rampung pada 2015. Namun, hingga kini, proyek itu baru terealisasi 48 persen.

Bambang menjelaskan bahwa akan ada tim yang terdiri atas Pemerintah Kota Jakarta Timur dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur untuk membebaskan lahan inlet sodetan itu. Tim tersebut juga akan bertugas mengukur lahan hingga menyelesaikan pemberkasannya. Setelah itu, kata Bambang, tim tersebut mengumumkan peta bidang atau lahan mana saja yang bakal dibebaskan. "Kemudian baru diukur ganti rugi pembebasan lahannya," ujarnya.

Bambang mengatakan Balai Besar belum mengalokasikan anggaran pembangunan inlet sodetan pada tahun ini. Balai Besar baru menganggarkan dana pembangunan inlet saat lahannya telah dibebaskan. "Takutnya nanti sudah dianggarkan, enggak terserap, jadi mubazir," kata dia.

Bambang menjelaskan bahwa keputusan itu didasari pengalaman saat melakukan normalisasi Ciliwung. Sejak 2013 hingga 2017, Balai Besar telah menganggarkan biaya normalisasi sungai terbesar di Jakarta itu sepanjang 33,69 kilometer. Namun pemerintah DKI bergerak lambat dalam pembebasan lahan, sehingga Balai Besar baru bisa menurap tepi Ciliwung sepanjang 16,19 kilometer. "Akhirnya dikembalikan ke kas negara sisanya," katanya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono mengatakan Gubernur Anies telah bermusyawarah dengan masyarakat penghuni bakal lokasi inlet sodetan Ciliwung. DKI, Basoeki melanjutkan, juga telah meneken penetapan lokasi untuk sodetan tersebut. "Mudah-mudahan tak sampai setahun selesai," ujar dia, pekan lalu.

Anies mengatakan pemerintah DKI telah menyampaikan rencana pembebasan lahan kepada warga setempat. Ia mengklaim pembebasan lahan itu mulai masuk tahap appraisal atau penaksiran harga. Setelah appraisal rampung, kata Anies, Kementerian bisa membayarkan ganti rugi atas pembebasan lahan itu. "Kemudian mulai penggarapan (pembangunan sodetan)," kata dia. **EGI ADYATAMA | GANGSAR PARIKESIT**



Pusat Sediakan Rp 60 Miliar untuk Lahan Sodetan Ciliwung